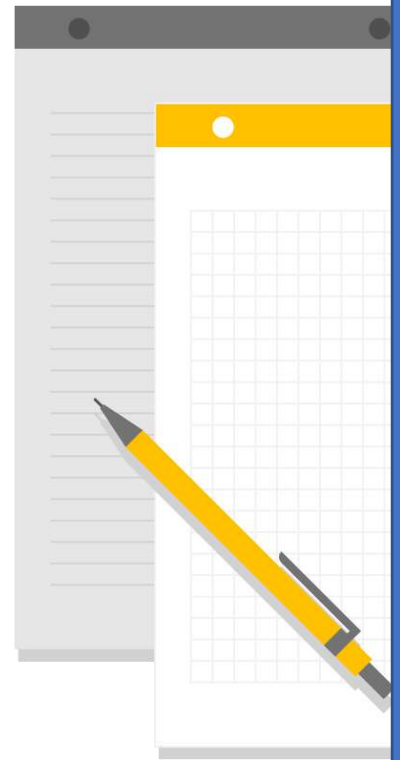


LKjIP

TAHUN 2025



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor yang bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan Dinas/Instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2026 dan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2025 Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah

Dalam menyusun laporan mengacu pada dokumen perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat diketahui, Akhirul kalam Wassalam Mualaikum Wara hmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196708081999031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. GAMBARAN UMUM.....	6
1. Pendahuluan.....	6
2. Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Organisasi.....	7
3. Tupoksi Jabatan Struktural.....	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	16
5. Sumber Daya Keuangan.....	22
6. Sarana dan Prasarana.....	26
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL.....	33
1. Visi.....	34
2. Misi.....	35
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.....	36
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA.....	46
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	47
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	63
4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	63
5. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	64
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	64
B. REALISASI ANGGARAN.....	66
BAB IV PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	17
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025.....	18
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselonering Tahun 2025.....	18
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2025.....	19
Tabel 1.5	Tabel Rincian Belanja Tahun 2025.....	22
Tabel 1.6	Tabel Asset Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	26
Tabel 1.7	Tabel Asset Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan.....	30
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan.....	37
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran.....	37
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	38
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	39
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.....	41
Tabel 2.6	Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial.....	44
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	44
Tabel 2.8	Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2025.....	45
Tabel 3.1	Nilai dan Kegiatan Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	46
Tabel 3.2	Sasaran Dinas Sosial	47
Tabel 3.3	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	49
Tabel 3.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	50
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	62
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	62
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.....	63
Tabel 3.8	Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	64
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Operasi dan Modal Tahun 2025.....	67
Tabel 3.10	Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025.....	67
Tabel 3.11	Realisasi Penyerapan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	9
Gambar 1.2	Peta Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	21



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Adapun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, merupakan harapan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,



bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta sasaran dengan yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati



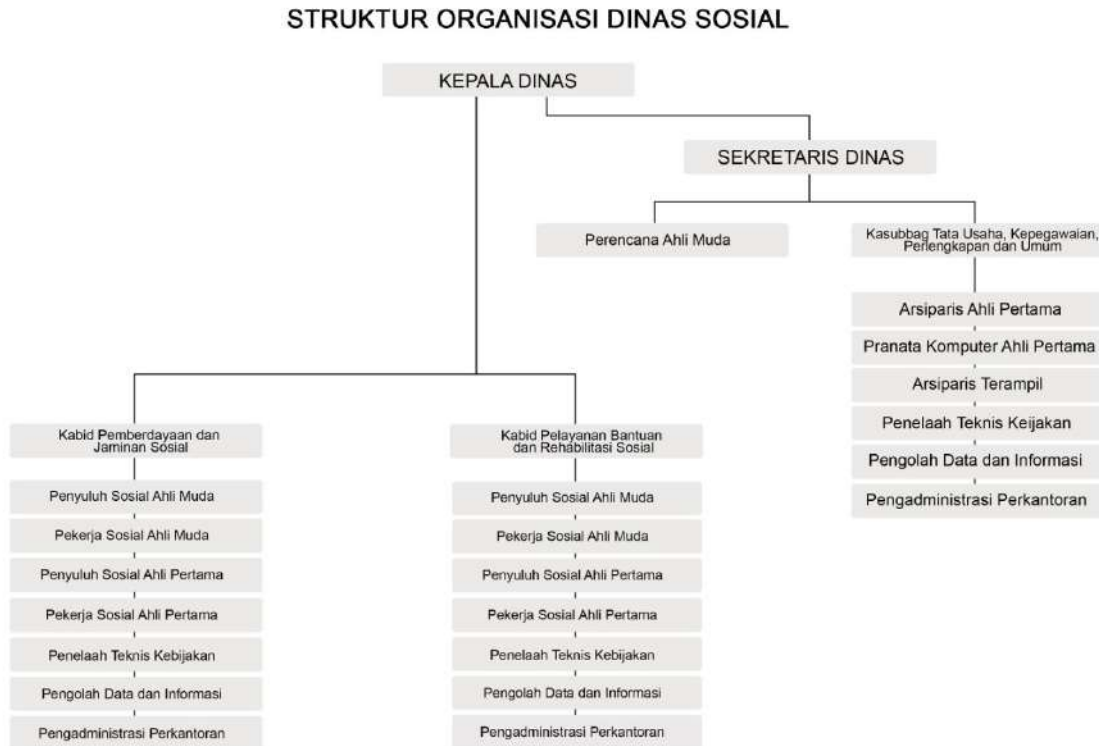
melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- c. penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan; pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial;
- d. penyelenggaraan administrasi dinas;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya



Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Tahun 2025

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



3. Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasi, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas Sosial.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaann kebijakan teknis dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang dinas;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja dinas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program bidang sosial;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum

Fungsi :



- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di dinas sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan pengatur penyelenggaraan tugas di dinas sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan;
- e. pengendalian kegiatan di dinas sosial;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di dinas sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- **Sub Bagian Tu, Kepegawaian Perlengkapan Dan Umum**

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan Umum.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;



- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan dan jaminan sosial Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA, serta penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang terlantar.

Fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban napza;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan



melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Penetapan rincian, tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau sub koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

1. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Fungsi :

- a. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. indentifikasi masalah/ issue strategis;
- c. menyusun kebijakan rencana pembangunan;
- d. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan; dan
- e. pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang



disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

Fungsi :

- a. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- b. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- c. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- d. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- e. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- f. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota; dan
- g. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

3. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial;
- b. penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial;
- c. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;



- d. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
- e. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- f. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota; dan
- g. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.

VI. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas SDM di suatu Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut :



Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2025

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S-2	3 orang	15 %
2.	S-1	14 orang	64 %
3.	Diploma	3 orang	6 %
4.	SLTA	2 orang	15 %
Jumlah		22 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial Kab.Kubu Raya, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personel Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 adalah Sarjana (S1) 14 orang atau 64% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 3 orang yaitu 15%, Diploma sebanyak 3 orang atau 6% sedangkan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang atau 15%. Adapun di Tahun 2025 ini penambahan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 Orang yaitu berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang, Diploma (D3) sebanyak 1 Orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 1 orang. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2025.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.2
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2025

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	3 orang	14%
2.	Penata	13 orang	60%
3.	Pengatur	2 Orang	9%
4.	Golongan IX	2 Orang	9%
5.	Golongan VII	1 Orang	4%
6.	Golongan V	1 Orang	4%
Jumlah		22 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 14 %, Penata 60 %, Pengatur 9 %, Golongan IX 9 %, Golongan VII 4 % dan Golongan V 4 %.

Selanjutnya Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2025

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	II	1 orang	5 %
2.	III	3 orang	14 %
3.	Fungsional	4 orang	18 %
4.	Pelaksana	14 orang	63 %
Jumlah		22 orang	100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2025



Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sudah terisi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga Pelaksana teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 10 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Adapun kekurangan tenaga pelaksana teknis di dinas sosial tersebut di sebutkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN KEBUTUHAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEBUTUHAN
(1)	(2)	(3)
1.	Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	
	1. Arsiparis Ahli Pertama	1
	2. Pranata Komputer Ahli Pertama	2
	3. Arsiparis Terampil	1
	4. Penelaah Teknis Kebijakan	2
	5. Pengolah Data dan informasi	2
	6. Pengadministrasi Perkantoran	3
2.	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	0
	2. Pekerja Sosial Ahli Muda	2
	3. Penyuluh Sosial Ahli Pertama	3
	4. Pekerja Sosial Ahli Pertama	3
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	2
	6. Pengolah Data dan Informasi	2
	7. Pengadministrasi Perkantoran	3
3.	Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	1
	2. Pekerja Sosial Ahli Muda	1
	3. Penyuluh Sosial Ahli Pertama	2
	4. Pekerja Sosial Ahli Pertama	0
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	4
	6. Pengolah Data dan Informasi	2
	7. Pengadministrasi Perkantoran	3
TOTAL		39

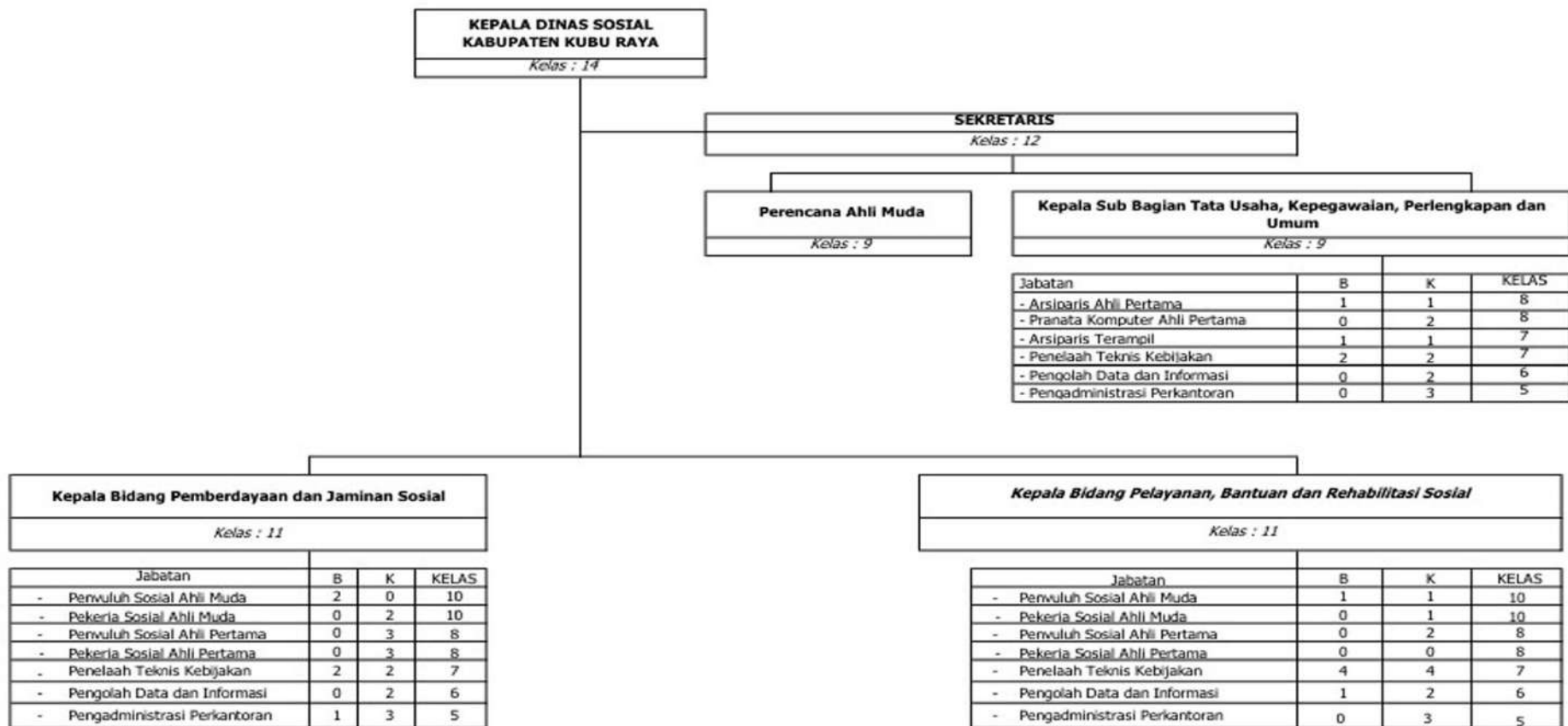
Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum



Berdasarkan Tabel 1.4 tersebut bahwa diketahui disemua bidang Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan tenaga pegawai sesuai jabatan yang disebutkan guna mencapai kinerja yang berkualitas dan mempercepat semua kegiatan yang ada Dinas Sosial.

Gambar 1.2

PETA JABATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Tahun 2025



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Belanja Operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 adalah Rp 6.238.272.925,61,- Berasal dari sumber dana APBD tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Belanja Tahun 2025

KODE REKENING	URA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.463.974.983,00	4.186.994.520,00	276.980.463,00	93,80%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.482.722,00	30.706.540,00	776.182,00	97,53%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.999.936,00	18.200.120,00	799.816,00	95,79%
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.034.585,00	19.710.020,00	324.565,00	98,38%
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.262.658,00	19.637.600,00	625.058,00	70,28%
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.275.847,00	19.955.000,00	320.847,00	98,42%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.619.826,00	18.866.980,00	752.846,00	96,16%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.975.615,00	6.689.600,00	286.015,00	95,90%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.980.549.775,30	2.783.506.225,00	197.043.550,00	93,39%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.158.666,00	38.047.200,00	111.466,00	99,71%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.579,00	9.967.980,00	31.599,00	99,68%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	6.969.178,00	6.864.860,00	104.318,00	98,50%



LKJIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

	Triwulanan/ Semesteran SKPD				
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.200,00	1.393.000,00	7.200,00	99,49%
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.366,00	2.091.400,00	2.907.966,00	41,83%
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.984.185,00	2.264.000,00	2.720.185,00	45,42%
1.06.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.074.156,00	46.070.200,00	3.956,00	99,99%
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.993.762,00	8.179.000,00	1.814.762,00	81,84%
1.06.01.2.05.01 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22.242.000,00	19.962.000,00	2.280.000,00	89,75%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.976.894,00	5.923.446,00	53.448,00	99,11%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.637.551,00	201.437.700,00	1.199.851,00	99,41%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.752.654,00	23.602.240,00	150.414,00	99,37%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.316.000,00	4.312.000,00	4.000,00	99,91%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.404.000,00	61.336.956,00	25.067.044,00	70,99%
1.06.01.2.06.01 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.996.440,00	4.989.600,00	6.840,00	99,86%
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0%
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	44.330.000,00	44.000.000,00	330.000,00	99,26%
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.334.754,00	87.800.000,00	2.534.754,00	97,19%
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000,00	198.000.000,00	0	100%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.942.452,00	55.243.968,00	3.698.484,00	93,73%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.583.416,00	304.978.200,00	31.605.216,00	90,61%



LKJIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.510.000,00	27.299.599,00	15.210.500,00	64,22%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.618.766,00	75.177.785,00	440.981,00	99,42%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.550.000,00	26.550.000,00	0	100%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	73.428.417,00	69.242.625,00	4.185.792,00	94,30%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	59.881.567,00	57.047.500,00	2.834.067,00	95,27%
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.546.850,00	12.195.125,00	1.351.725,00	90,02%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.238.031,00	2.234.500,00	3.531,00	99,84%
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.238.031,00	2.234.500,00	3.531,00	99,84%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	277.253.622,61	222.112.374,00	55.141.248,61	80,11%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	22.853.468,00	21.664.500,00	1.188.968,00	94,80%
1.06.04.2.01.00 02	Penyediaan Sandang	18.163.284,00	853.060,00	17.310.224,00	4,70%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	84.415.679,00	80.759.900,00	3.655.779,00	95,67%



LKJIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.587.528,00	4.587.000,00	528,00	99,99%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	42.052.215,00	34.542.720,00	7.509.495,00	82,14%
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.506.359,00	3.492.500,00	13.859,00	99,60%
1.06.04.2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	646.509,00	629.780,00	16.729,00	97,41%
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	747.366,00	746.180,00	1.186,00	99,84%
1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	53.310.355,61	38.913.074,00	14.397.281,61	72,99%
1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.836.552,00	3.764.300,00	72.252,00	98,12%
1.06.04.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	19.755.594,00	14.058.620,00	5.696.974,00	71,16%
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.380.563,00	15.105.540,00	5.275.023,00	74,12%
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.998.150,00	2.995.200,00	2.950,00	99,90%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.376.523,166,00	1.275.751.362,00	53.794.804,00	95,95%
1.06.05.2.01	Rujukan Anak-anak Terlantar	3.554.308,00	3.544.920,00	9.388,00	99,74%
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.750.000,00	6.300.000,00	450.000,00	93,33%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.709.822,00	68.846.020,00	19.863.802,00	77,61%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin	81.956.974,00	68.270.943,00	13.686.031,00	83,30%



	Cakupan Daerah SKabupaten/Kota				
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.148.575.062,00	1.128.789.479,00	19.785.583,00	98,28%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	91.828.706,00	57.331.928,00	34.499.778,00	62,43%
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	81.588.679,00	47.211.620,00	34.380.059,00	57,86%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10.240.027,00	10.120.308,00	119.719,00	98,83%
TOTAL		6.238.272.925,61	5.813.667.309,00	424.605.616,61	93,19%

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar **Rp. 5.813.667.309,00** dengan persentase sebesar 93,19%. Dengan ini dapat dikatakan bahwa anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya belum dapat terserap dan direalisasikan dengan baik.

6. Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Supadio No 16, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun Asset yang ada di Kantor Dinas Sosial saat ini sebagai berikut :

Tabel 1.6
TABEL ASSET TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
2	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
3	Meubeleur lainnya	420x505x875 mm	Baik
4	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik



NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Kursi Besi/Metal	62x60x78 mm	Baik
9	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
11	Kursi Besi/Metal	40x40x43 mm	Baik
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
13	P.C Unit	22 inci	Baik
14	P.C Unit	22 inci	Baik
15	Lap Top	14 inci	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
17	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1500	Baik
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	482x22x130 mm	Baik
20	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2500	Baik
21	A.C. Split	1/2 pk	Baik
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x80	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
26	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
27	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
28	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
29	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
30	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
31	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
32	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
33	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
34	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
35	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
36	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
37	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
38	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
39	A.C. Split	1 PK	Baik
40	A.C. Split	1 PK	Baik
41	A.C. Split	1/2 PK	Baik



NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
42	A.C. Split	1/2 PK	Baik
43	A.C. Split	1/2 PK	Baik
44	A.C. Split	1/2 PK	Baik
45	Televisi	40 INCH	Baik
46	Tangki Air	300 Liter	Baik
47	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
49	P.C Unit	19 inci	Baik
50	Lap Top	14 inci	Baik
51	Lap Top	14 inci	Baik
52	Lap Top	14 inci	Baik
53	Lap Top	14 inci	Baik
54	Hard Disk	2 TB	Baik
55	Hard Disk	2 TB	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
59	Sepeda Motor	155	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	50x120x75	Baik
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	50x120x75	Baik
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik
68	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
69	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
70	P.C Unit	21.5	Baik
71	P.C Unit	21.5 inci	Baik
72	Lap Top	10 inci	Baik
73	Lap Top	14,0 inci	Baik



NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
74	Lap Top	14 inci	Baik
75	Lap Top	14 inci	Baik
76	Lap Top	15.6 inci	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x237 mm	Baik
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
81	Sepeda Motor	155	Baik
82	Sepeda Motor	155	Baik
83	Sepeda Motor	155	Baik
84	Sepeda Motor	155	Baik
85	Sepeda Motor	155	Baik
86	Sepeda Motor	155	Baik
87	Mesin Absen (Time Recorder)	19,3x16,5x8,6 cm	Baik
88	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
89	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
90	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
91	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
92	A.C. Split	1 PK	Baik
93	A.C. Split	1 PK	Baik
94	A.C. Split	2 PK	Baik
95	Kipas Angin	9	Baik
96	Kipas Angin	16	Baik
97	Kipas Angin	18	Baik
98	Kipas Angin	16	Baik
99	Kipas Angin	18	Baik
100	Kipas Angin	16	Baik
101	Kipas Angin	16	Baik
102	Kipas Angin	16	Baik
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
105	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
106	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
107	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
108	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		Baik



NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
109	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
110	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
111	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
112	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
113	P.C Unit	21,5 inci	Baik
114	P.C Unit	21,5 inci	Baik
115	Lap Top	14 inci	Baik
116	Lap Top	14 inci	Baik
117	Lap Top	14 inci	Baik
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x380x237 mm	Baik
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48X45X28 cm	Baik

Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, tahun 2025

Berdasarkan kebutuhan kantor sebagai penunjang kegiatan dan pekerjaan saat ini masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan sebagai berikut :

Tabel 1.7
TABEL ASSET TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN KEBUTUHAN

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Motor	11	Unit
2	AC 2 PK	19	Unit
3	AC 1 PK	16	Unit
4	PC	14	Unit
5	INFOCUS	2	Unit



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas;
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal;
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH;
10. Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH;
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari/atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar; dan
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat *outcome* yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Rencana Strategis Dinas Sosial telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kubu Raya dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang dimaksud dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu



pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Visi

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Renstra pada periode ini merupakan Renstra transisi yang disusun sebelum penetapan visi dan misi Bupati Terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa



dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kubu Raya Melaju (Melayani Untuk Maju).”**

2. Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) Misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel, dan digitalisasi;
- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang layak, merata dan berkualitas; dan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta pemberdayaan masyarakat madani humanis dan religius.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi Perangkat Daerah, ketiga Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten



Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 1 (Satu) yaitu Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel, dan digitalisasi.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026. Visi dari Dinas Sosial adalah

“Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good dan Clean Governance).”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

3.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan berwibawa
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan di tetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP

3.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Berikut tabel tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	B (75)
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan, sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna



tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Visi 1	Terwujudnya Kubu Raya Melaju			
Misi 1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa (Good Governance)			
Tujuan	1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat			
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			
Sasaran	1. Meningkatkan Penanganan PPKS			
	2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Keuangan			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1 Meningkatkan Penanganan PPKS	1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PPKS
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2 Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	2 Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :



- 1) sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
- 5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2025-2026 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	B (75)
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%

Adapun program - program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 4) Program Rehabilitasi Sosial;
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 6) Program Penanganan Bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta peningkatan peran partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu



Raya. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

1. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

- 1) metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman;
- 3) metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan; dan
- 4) metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

2. Melalui metode diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

1. Masih tingginya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya;
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas;
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan belum terdayagunakan secara optimal;
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal;
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar Dan ABH;
10. Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH;
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) kota singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten kota se-Kalbar; dan
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan orang terlantar (ot), orang dalam gangguan jiwa (odgj), lansia terlantar dan abh;



3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2.6
Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Nilai SAKIP pada SKPD	Nilai SAKIP	-	CC (60)	B (65)	B (70)	B (75)	A (80)	B (75)
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	-	2%	80%	85%	90%	100%	90%

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 73.428.417	APBD
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 2.238.031	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 271.253.623	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 1.329.546.166	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 91.831.706	APBD
TOTAL	Rp. 1.768.297.943	APBD

Alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8
Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan
Tahun Anggaran 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KET
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 73.428.417	Rp. 69.242.625	APBD
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 2.238.031	Rp. 2.234.500	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 271.253.623	Rp. 222.112.374	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 1.329.546.166	Rp. 1.275.751.362	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 91.831.706	Rp. 57.331.928	APBD
TOTAL		Rp.1.768.297.943	Rp. 1.626.672.789	APBD

Pada tabel di atas, Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan prioritas, jumlah anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 1.626.672.789,-** dari total belanja sebesar **Rp. 1.768.297.943,-**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2025 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2025. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2025.

Berdasarkan Skala Penilaian sesuai Permenpan RB No. 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai acuan instansi pemerintah menilai kinerja secara berjenjang. Peraturan ini menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja, dengan hasil akhir berupa predikat kinerja yang dapat mempertimbangkan ekspetasi pimpinan satu tingkat di atasnya.

Tabel 3.1
Nilai dan Kategori Predikat
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Nilai	Kategori/Predikat
1.	> 90 – 100	AA/Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	A/Memuaskan
3.	> 70 – 80	BB/Sangat Baik
4.	> 60 – 70	B/Baik



5.	> 50 – 60	CC/Cukup
6.	> 30 – 50	C/Kurang
7.	> 0 – 30	D/Sangat Kurang

Sumber : Permenpan RB No. 22 Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Sasaran Strategis Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	N/A
			75	
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	74,79 %

Sumber : Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Berikut ini perolehan capaian IKU tahun 2025 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

- **Penjelasan**

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Penanganan PPKS” tidak mencapai dari target yang di tetapkan dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam pelayanan dan penanganan PPKS Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan data jauh lebih akurat untuk penghitungan fakir miskin menggunakan DTSEN.



Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi :

Persentase Penanganan PPKS :

$$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani}}{\text{Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$

Dari Formulasi tersebut, Dinas Sosial dapat menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, yang mana untuk memperoleh perhitungan capaian IKU adalah berdasarkan jumlah PPKS yang tertangani/terlayani. Pengertian dari PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis PPKS yang terlayani di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya :

1. Anak Terlantar Diluar Panti Sosial;
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
3. Disabilitas;
4. Disabilitas Mental;
5. Korban Bencana Alam;
6. Korban Bencana Sosial;
7. Lansia Terlantar;
8. Orang Terlantar;
9. Gelandangan Dan Pengemis;
10. Mayat Terlantar; dan
11. Fakir Miskin



Tabel 3.3
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya

No.	NAMA	POPULASI	REALISASI
1	ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI SOSIAL	7	7
2	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	52	52
3	DISABILITAS	188	88
4	DISABILITAS MENTAL	32	32
5	KORBAN BENCANA ALAM	13410	13410
6	KORBAN BENCANA SOSIAL	131	131
7	LANSIA TERLANTAR	18	18
8	ORANG TERLANTAR	35	35
9	GELANDANG DAN PENGEMIS	9	9
10	MAYAT TERLANTAR	3	3
11	FAKIR MISKIN	295812	217845
TOTAL		309697	231630

Sumber : Realisasi Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = \frac{231630}{309697} \times 100$$

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = 74,79\%$$

Tersedianya Data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penghitungan realisasi data fakir miskin menggunakan DTSEN.



2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Mendidik masyarakat untuk mandiri dengan usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan, agar tepat sasaran.
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	55 Orang	Meningkatkan Kemampuan Potensi Pekerja agar bisa mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Memvalidasi dan pendataan Target Pekerja Sosial masyarakat yang akan diberikan sosialisasi dan koordinasi
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20 Lembaga	Meningkatkn Kemampuan Kelembagaan agar bisa mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.	Memvalidasi dan pendataan target kelembagaan masyarakat yang akan diberikan sosialisasi dan koordinasi.
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN					
1	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke	5 Orang	2 Orang	Sebelum melaksanakan program tersebut kita harus mempunyai validasi data warga negara migran korban tindak kekerasan	Validasi data harus dilaksanakan agar dapat memberikan solusi untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.



	desa/kelurahan asal				
1.1	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	2 Orang	Sebelum melaksanakan program tersebut kita harus mempunyai validasi data warga negara migran korban tindak kekerasan	Validasi data harus dilaksanakan agar dapat memberikan solusi untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %	100 %	Untuk atensi Kegiatan Rehabiliatsi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Aank Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial harus menggunakan pendekatan berbasis keluarga,komunitas,resid ensial melalui kegiatan yang mendukung pelayanan sosial	Mengimplementasikan rencana program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan
1.1	Penyediaan Permakanan	42 Orang	57 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Makanan sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Makanan dengan tepat sasaran
1.2	Penyediaan Sandang	33 Orang	49 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi sandang dengan tepat sasaran



				sandang sesuai dengan keadaan dilapangan	
1.3	Penyediaan Alat Bantu	33 Orang	88 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Alat Bantu sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Alat Bantu dengan tepat sasaran
1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 Orang	12 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan tepat sasaran
1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritiual dan Sosial	100 Orang	253 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritiual dan Sosial sesuai dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritiual dan Sosial dengan tepat sasaran
1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5 Orang	234 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan tepat sasaran



				serta Gelndangan Pengemis dan Masyarakat dengan keadaan dilapangan	
1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10 Orang	137 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan tepat sasaran
1.8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	254 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Data dan Pengaduan dengan tepat sasaran
1.9	Pemberian Layanan Kedaruratan	14 Orang	254 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan Kedaruratan dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Kedaruratan dengan tepat sasaran
1.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	50 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Pelayanan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan tepat sasaran



				Penelusuran Keluarga dengan keadaan dilapangan	
1.11	Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	45 Orang	Melalui Pendekatan berbasis Keluarga, Komunitas dan Residensial kita dapat memperoleh Data PPKS yang berhak mendapatkan Layanan Rujukan dengan keadaan dilapangan	Validasi Data Harus dilaksanakan agar dapat memberikan Layanan Rujukan dengan tepat sasaran
2	Fasilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	100%	100%	Untuk atensi Kegiatan Rehabiliatsi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Aank Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial harus menggunakan pendekatan berbasis keluarga,komunitas,resid ensial melalui kegiatan yang mendukung pelayanan sosial	Mengimplementasikan rencana program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan
2.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 Orang	134 Orang	Melalui Pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial kita dapat memperoleh data PPKS yang berhak mendapatkan fasilitasi pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA sesuai dengan keadaan dilapangan	Pendampingan terhadap PMKS bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dilaksanakan hingga tuntas sesuai dengan kasus yang dihadapi
2.2	Pemberian Akses Kelayanan	50 Orang	136 Orang	Melalui Pendekatan berbasis keluarga,	Pendampingan terhadap PMKS Akses



	Pendidikan dan Kesehatan Dasar			komunitas dan residensial kita dapat memperoleh data PPKS yang berhak mendapatkan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai dengan keadaan dilapangan	Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dilaksanakan hingga tuntas sesuai dengan kasus yang dihadapi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	100 Persen		
1.1	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2 Orang	2 Orang		
1.2	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10 Orang	500 Orang		
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Data Pengelolaan Fakir Miskin yang Valid	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementrian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.000 Orang	2000 Orang	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dengan sistem yang tersedia, serta Penyaluran Bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	Inovasi Baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir Miskin agar lebih akurat
2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	400 Keluarga	400 Keluarga	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dengan sistem yang tersedia, serta Penyaluran Bantuan	Inovasi Baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir Miskin agar lebih akurat



				tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	
3.3	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400 Keluarga	400 Keluarga	Verifikasi dan Validasi Data fakir Miskin dengan sistem yang tersedia serta penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia	Inovasi baru terhadap sistem pendataan dan pengelolaan fakir miskin agar lebih akurat
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Pendataan dan Penanganan Bantuan dengan sigap dan tepat sasaran	Inovasi dan Bekerja sama dengan berbagai sektor Penanggulangan Bencana
1.1	Penyediaan Makanan	33 Orang	13.541 Orang	Program Penyaluran Bantuan Makanan bagi Warga Terdampak Bencana dengan sigap dan Cepat	Inovasi baru terkait Pendataan Bantuan agar tepat sasaran dan sesuai target serta data korban disajikan dengan lebih akurat
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Darurat Bencana	Apreasiasi terhadap Masyarakat Tanggap Bencana, serta Sosialisasi dan pelatihan agar lebih sigap dalam penanganan bencana
1.3	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Darurat Bencana	Apreasiasi terhadap Masyarakat Tanggap Bencana, serta Sosialisasi dan pelatihan agar lebih sigap dalam penanganan bencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



LKjIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43%	43%	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	23 Orang	23 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	1312 Dokumen	1312 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



	asi Keuangan SKPD				
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23 Orang	23 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
4.2	Pendataan dan Pengelolaan	7 Dokumen	7 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



	Administrasi Kepegawaian			urusan pemerintah daerah	
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	3 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket	8 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Dokumen	365 Dokumen	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Laporan	300 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	55 Unit	55 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



	Pemerintah Daerah				
6.1	Pengadaan Mebel	10 Unit	10 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Laporan	37 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	13 Laporan	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit	43 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	1 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan



	atau Kendaraan Dinas Jabatan				
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	Meningkatkan mutu pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Efisiensi anggaran yang telah disediakan

Dari Tabel diatas analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dalam pencapaian tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan program secara jelas dan spesifik. Tujuan program harus sesuai dengan misi dan visi SKPD serta relevan dengan masalah yang diselesaikan;
2. Mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan pelaksanaan program hasil dan perubahan yang terjadi pada kondisi awal setelah adanya intervensi program;
3. Menyusun indikator untuk setiap awal yang diharapkan indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil telah tercapai atau tidak, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu; dan
4. Menetapkan sumber data dan metode pengumpulan data untuk setiap indikator. Sumber data adalah tempat atau dapat memberikan informasi tentang indikator.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2025	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	94,30%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	99,84%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	80,11%
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	95,95%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	62,43%

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2025	
			Target	Realisasi
1	MENINGKATNYA PENANGANAN PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	100%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	40%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	100%
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	85%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	100%

Dapat dilihat pada tabel diatas, realisasi capaian kinerja total pada sasaran strategis hampir semua tercapai dikarenakan program terlaksana dengan baik. Pada program Penanganan Warga Negara



Migran Korban Tindak Kekerasan dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tidak sesuai target kinerja karena Dinas Sosial belum mendapatkan data secara optimal sehingga hanya melayani PPKS sesuai dengan SK yang ada dan data dari stakeholder yang masih belum optimal.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dimpulkan bahwa terdapat program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target serta yang belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu perlu memaksimalkan kegiatan pendataan agar Dinas Sosial dapat mengolah data dengan lebih baik.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	87%	84,67 %	99,21 %	99,60 %	74,79 %

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 tidak mencapai target kinerja tahun 2025, ini merupakan suatu pencapaian yang perlu diperhatikan, karena realisasi **79,79%** dari target **sebesar 90%**. Pertumbuhan Penanganan dan Pelayanan PPKS terlihat tidak baik di Tahun 2025, realisasi yang mengalami penurunan pada tahun



ini dikarenakan data jauh lebih akurat dan untuk penghitungan data fakir miskin menggunakan DTSEN.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Tabel 3.8
Sasaran Strategis Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2025	Realisasi					Capaian Kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	87%	84,6%	99,21%	99,60%	74,79%	74,79%

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2025

Diketahui dari tabel di atas untuk meningkatkan realisasi pada IKU diharapkan agar setiap tahun anggaran terus meningkat sehingga penanganan semua jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun kuantitas dapat tertangani.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

Adapun sasaran dari Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Belum semua Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kuantitas maupun kualitas dapat tertangani;
- 2) Minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan PPKS;



- 3) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bentuk dukungan personil baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas;
- 4) Minimnya Anggaran untuk Penanganan Capaian SPM.;
- 5) Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH;
- 6) Tidak memiliki *shelter* (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan jiwa (OGDJ), Lansia Terlantar dan ABH;
- 7) Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan/atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar; dan
- 8) Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia Terlantar.

• **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah dan antar daerah dalam penanganan PPKS;
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar dalam mendukung pelayanan dan penanganan PPKS;
- 3) Penambahan Jumlah SDM (Pegawai) dan Pengusulan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas SDM;
- 4) Penambahan/Peningkatan dan memprioritaskan anggaran Urusan Sosial Dasar dibandingkan dengan urusan pilihan dalam Pelaksanaan Pelayanan Minimal;
- 5) Diperlukan Kantor permanen (tidak menyewa) agar pelayanan kepada masyarakat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ),



Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH menjadi lebih maksimal;

- 6) Diperlukan *Shelter* (Rumah Singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH sebelum dilanjutkan ke Dinas Provinsi Kalbar dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Kalbar;
- 7) Diperlukan penambahan fasilitas sarana prasarana berupa mobil atau motor untuk mendukung pengantaran dan penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang serta Orang terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke kabupaten atau kota se-Kalbar; dan
- 8) Diberikan tambahan alokasi anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya khususnya Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH, dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun sebagai pelaksanaan tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, mendapatkan alokasi dana dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial tahun 2025.

Realisasi anggaran tahun 2025 khususnya untuk belanja operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Tahun 2025

No.	KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
1	BELANJA OPERASI	Rp. 6.116.821.493,61	Rp. 5.813.667.309,00
2	BELANJA MODAL	Rp. 121.451.432,00	Rp. 120.800.000,00
	JUMLAH	Rp. 6.238.272.925,61	Rp. 5.934.467.309,00

Sumber : Laporan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2025

Tabel 3.10
Realisasi Program Dan Kegiatan
Tahun 2025

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.723.187.303,30	4.186.994.520,00	93,80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.171.722,00	30.706.540,00	97,53%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.999.936,00	18.200.120,00	95,79%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.999.891,00	19.710.020,00	98,38%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.262.658,0	19.637.600,00	70,28%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.999.962,00	19.955.000,00	98,42%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.826,00	18.866.980,00	96,16%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.975.615,00	6.689.600,00	95,90%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.312.016.060,30	2.783.506.225,00	93,39%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.158.666,00	38.047.200,00	99,71%



LKjIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.579,00	9.967.980,00	99,68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.969.178,00	6.864.860,00	98,50%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.200,00	1.393.000,00	99,49%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.366,00	2.091.400,00	41,83%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.984.185,00	2.264.000,00	45,42%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	46.070.200,00	99,99%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.993.762,00	8.179.000,00	81,84%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	19.962.000,00	89,75%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.976.894,00	5.923.446,00	99,11%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.679.951,00	201.437.700,00	99,41%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.752.952,00	23.602.240,00	99,37%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.316.000,00	4.312.000,00	99,91%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.508.000,00	61.336.956,00	70,99%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.996.440,00	4.989.600,00	99,86%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.934.200,00	0	0%
Pengadaan Mebel	44.330.000,00	44.000.000,00	99,26%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.334.754,00	87.800.000,00	97,19%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000,00	198.000.000,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.942.452,00	55.243.968,00	93,73%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.383.416,00	304.978.200,00	90,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	42.510.000,00	27.299.599,00	64,22%



LKjIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.041.638,00	75.177.785,00	99,42%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.550.000,00	26.550.000,00	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	28.445.790,00	69.242.625,00	94,30%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.898.940,00	57.047.500,00	95,27%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.546.850,00	12.195.125,00	90,02%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.238.031,00	2.234.500,00	99,84%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.238.031,00	2.234.500,00	99,84%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	257.405.192,00	222.112.374,00	80,11%
Penyediaan Permakanan	22.853.468,00	21.664.500,00	94,80%
Penyediaan Sandang	18.163.284,00	853.060,00	4,70%
Penyediaan Alat Bantu	84.415.679,00	80.759.900,00	95,67%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.587.528,00	4.587.000,00	99,99%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	41.237.215,00	34.542.720,00	82,14%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.506.359,00	3.492.500,00	99,60%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	646.509,00	629.780,00	97,41%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	747.366,00	746.180,00	99,84%
Pemberian Layanan Kedaruratan	34.276.925,00	38.913.074,00	72,99%



LKjIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.836.552,00	3.764.300,00	98,12%
Pemberian Layanan Rujukan	19.755.594,00	14.058.620,00	71,16%
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.380.563,00	15.105.540,00	74,12%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.998.150,00	2.995.200,00	99,90%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.376.523.166,00	1.275.751.362,00	95,95%
Rujukan Anak-anak terlantar	3.554.308,00	3.544.920,00	99,74%
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.750.000,00	6.300.000,00	93,33%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.709.822,00	68.846.020,00	77,61%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.611.974,00	68.270.943,00	83,30%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.346.897.062,00	1.128.789.479,00	98,28%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	91.828.706,00	57.331.928,00	62,43%
Penyediaan Makanan	81.588.679,00	47.211.620,00	57,86%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10.240.027,00	10.120.308,00	98,83%
TOTAL	Rp. 6.238.272.925,61	5.813.667.309,00	93,19%



Tabel 3.11
Realisasi Penyerapan Anggaran Sesuai
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	95,01%	
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20	100%	Kegiatan dilaksanakan dengan cukup baik walaupun belum sesuai target yang telah ditentukan karena sedang berjalan dengan target
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20	90,02%	Sedang dilaksanakan dengan baik walaupun terkadang ada kendala dan hambatan dalam koordinasi dikarenakan terkadang tidak semua dapat hadir dalam koordinasi
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAAN					
1	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	5 Orang		99,84%	
1.1	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	2 Orang	99,84%	Dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan menuju target yang telah ditentukan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1	Fasilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak	100 %	100 %	94,44%	Kurangnya Pendataan dan Koordinasi serta Laporan dari Masyarakat terkait Penyandang



LKJIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

	terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.1	Penyediaan Permakanan	42 Orang	42 Orang	94,80%	Keadaan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan sulitnya dalam menghitung realisasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan makanan
1.2	Penyediaan Sandang	33 Orang	33 Orang	4,70%	Kegiatan Penyediaan Sandang sudah cukup baik dan berjalan mencapai target
1.3	Penyediaan Alat Bantu	33 Orang	33 Orang	431,96 %	Upgrade Alat Bantu dengan yang jauh lebih optimal sehingga mengurangi kuota pembelian alat bantu karena harga alat bantu yang lebih fungsional jauh lebih mahal dari yang sebelumnya telah di anggarkan
1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 Orang	12 Orang	99,79%	Sudah cukup baik karna sudah berjalan mencapai target
1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiriitual dan Sosial	100 Orang	100 Orang	83,77%	Sudah Cukup baik karna sudah berjalan mencapai target
1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5 Orang	5 Orang	99,60%	Kegiatan ini dilaksanakan dengan Baik dan sesuai target
1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10 Orang	10 Orang	97,41 %	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sedang dan akan dilaksanakan sesuai taget



1.8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	10 Orang	99,84%	Dilaksanakan dengan baik
1.9	Pemberian Layanan Kedaruratan	14 Orang	14 Orang	112,46 %	Dilaksanakan dengan baik
1.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	10 Orang	98,12%	Dilaksanakan dengan baik
1.11	Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	10 Orang	71,16%	Dilaksanakan dengan baik
2	Kegiatan Fasilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial			87,01%	
2.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 Orang	50 Orang	74,12%	Sudah cukup baik karna sudah hampir mencapai target
2.2	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	50 Orang	99,90%	Sudah cukup baik karna sudah hampir mencapai target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100%	96,53%	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
1.1	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2 Orang	2 Orang	99,74%	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
1.2	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan	10 Orang	10 Orang	93,33%	Kurangnya Transparansi Data serta Regulasi Penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial



	Pemeliharaan Anak Terlantar				Sehingga menyulitkan melakukan pendataan Fakir Miskin yang mendapat Bantuan
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			600%	Upgrade Alat Bantu dengan yang jauh lebih optimal sehingga mengurangi kuota pembelian alat bantu karena harga alat bantu yang lebih fungsional jauh lebih mahal dari yang sebelumnya telah di anggarkan
2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2000 Orang	554 Orang	790,44 %	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	400 Keluarga	400 Keluarga	643,34 %	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
2.3	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400 Keluarga	400 Keluarga	363,98 %	Dilaksanakan dengan baik, walaupun belum mencapai target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			57,87%	
1.1	Penyediaan Makanan	33 Orang	33 Orang	57,87%	Belum dilaksanakan sesuai target
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	98,83%	
2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	98,83%	Sudah cukup baik dalam koordinasi dengan Taruna Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana Sesuai SK yang berlaku



					berjumlah 50 Orang dan sesuai target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	96,70%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	101,77 %	Penyusunan Dokumen sedang dilaksanakan sesuai Target
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	91,00%	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	98,55%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	96,92%	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	99,78%	Koordinasi Dokumen Perubahan DPA SKPD Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 Laporan	94,34%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Telah dan sedang dilaksanakan sesuai Target
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	95,90%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan di akhir tahun
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95,50%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/Bulan	84,04%	Gaji dan Tunjangan sudah dibayarkan sesuai Target
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1312 Dokumen	1312 Dokumen	99,71%	Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD telah dan sedang dilaksanakan sesuai target



LKjIP TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	99,68%	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai target di akhir tahun
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	98,50%	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dalam pelaksanaan sesuai target
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah			62,24%	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	99,49%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sedang dilaksanakan sesuai target
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	41,83%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sedang terlaksana sesuai target
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 Laporan	45,42%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sedang dilaksanakan sesuai target
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			87,23%	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	Dilaksanakan dengan baik
4.2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	7 Dokumen	81,84%	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sedang dilaksanakan sesuai target
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	3 Orang	79,85%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belum dilaksanakan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			91,60%	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	99,11%	Dilaksanakan sesuai Target dan Sudah cukup baik



	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket	8 Paket	150,69 %	Penyediaan Bahan Logistik Kantor sedang dilaksanakan sesuai target
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	2 Paket	99,37%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sedang dilaksanakan sesuai target
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Dokumen	365 Dokumen	99,91%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sedang dilaksanakan sesuai target
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	52 Laporan	92,22%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sedang dilaksanakan sesuai target
5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Laporan	300 Laporan	99,86%	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sedang dilaksanakan sesuai target
5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	-	0%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD belum dilaksanakan sesuai target
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98,90%	
6.1	Pengadaan Mebel	10 Unit	10 Unit	99,26%	Pengadaan Mebel sedang dilaksanakan sesuai target
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	97,19%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sedang dilaksanakan sesuai target
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah dilaksanakan sesuai target
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89,30%	
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	93,73%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



					sedang dilaksanakan sesuai target
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	13 Laporan	84,86%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sedang dilaksanakan sesuai target
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,80%	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	97,70%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah dilaksanakan sesuai target
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	8 Unit	42,66%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sedang dilaksanakan sesuai target
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	10 Unit	98,86%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sedang dilaksanakan sesuai target

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih tinggi daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya menghampiri target. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana



membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. efisiensi sumber daya pada Dinas Sosial sangat baik. ada beberapa Indikator yang capaiannya kurang baik Hal ini disebabkan karena masih kurangnya perencana yang matang mengenai pelayanan dasar di program pemberdayaan sosial.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian di atas adalah untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak terlepas dari tersedianya data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dimasa yang akan datang. Masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam daerah maupun luar daerah dalam penanganan PPKS.
2. Menambah Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam penanganan PPKS.
3. Pimpinan senantiasa mengarahkan dalam upaya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.



Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010



Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2025

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (75)	N/A
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	74,79%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

: **Rp. 6.238.272.925,61,-**

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

: **Rp. 5.813.667.309,00**

Sungai Raya, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196708081999031010